

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Barang Publik

Clara Anjani¹, Hendra riofita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: claraanjani024@gmail.com¹ hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak

Penyediaan barang publik merupakan salah satu peran utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kegagalan pasar. Barang publik seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur dasar tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar karena sifatnya yang non-rival dan non-ekskludabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap penyediaan barang publik serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur dan data sekunder dari berbagai laporan pemerintah dan jurnal ilmiah. Hasil menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan subsidi telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas barang publik. Namun, tantangan masih ada terkait efisiensi anggaran, birokrasi, dan ketimpangan distribusi antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang bersifat partisipatif, transparan, dan berbasis data untuk memastikan distribusi barang publik yang adil dan merata.

Kata kunci: *kebijakan publik, barang publik, intervensi pemerintah, kesejahteraan sosial*

Abstract

The provision of public goods is one of the main roles of the government in realizing public welfare and overcoming market failures. Public goods such as education, health, defense, and basic infrastructure cannot be provided optimally by market mechanisms due to their non-rival and non-excludable nature. This study aims to analyze the extent to which government policies contribute to the provision of public goods and the challenges faced in their implementation. The method used is a descriptive qualitative study with a literature approach and secondary data from various government reports and scientific journals. The results show that government intervention through fiscal policy, regulation, and subsidies has increased the accessibility and quality of public goods. However, challenges still exist regarding budget efficiency, bureaucracy, and inequality in distribution between regions. Therefore, participatory, transparent, and data-based policy reforms are needed to ensure fair and equitable distribution of public goods.

Keywords : *public policy, public goods, government intervention, social well*

PENDAHULUAN

Barang publik merupakan elemen fundamental dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik utama barang publik adalah non-rivalry dan non-excludability, yang berarti konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain, dan tidak ada pihak yang dapat dikecualikan dari penggunaannya. Contoh barang publik meliputi infrastruktur jalan, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam penyediaan barang-barang ini karena mekanisme pasar seringkali gagal menyediakan barang publik secara efisien dan merata.

Dalam konteks Indonesia, penyediaan barang publik menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi geografis yang luas dan beragam, serta tingkat pembangunan yang tidak merata antar daerah. Desentralisasi fiskal yang diterapkan sejak awal 2000-an memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan publik. Namun, studi oleh Pal dan Wahhaj (2012) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia menghasilkan variasi dalam pengeluaran publik antar komunitas, tergantung pada institusi lokal yang ada. Komunitas dengan hukum adat yang kuat cenderung memiliki pengeluaran lebih besar untuk sekolah dan pusat kesehatan, sementara komunitas dengan sistem demokrasi elektoral menunjukkan pengeluaran yang lebih rendah untuk infrastruktur seperti jalan dan transportasi umum.

Kebijakan pemerintah dalam penyediaan barang publik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas fiskal daerah, kualitas tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Azwar (2020) menekankan pentingnya peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengadaan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Namun, desentralisasi fiskal juga membawa tantangan baru, termasuk potensi peningkatan korupsi di tingkat lokal. Desentralisasi fiskal di Indonesia dikaitkan dengan peningkatan insiden korupsi di tingkat pemerintah daerah, terutama dalam bentuk suap dan penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa publik. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, desentralisasi fiskal dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan anggaran publik.

Dengan demikian pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi negara sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat. Pelayanan publik timbul dari kepentingan pribadi atau himpunan kepentingan dari sekelompok orang atau masyarakat dengan intensitas yang berbeda tetapi tidak bertentangan dengan norma masyarakat serta aturan yang berlaku, disamping itu pemenuhan layanan kepentingan publik juga sangat tergantung pada faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan publik, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, faktor organisasi dan sistem yang memungkinkan. berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dan faktor ketrampilan petugas dan sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan pelayanan (Hendra Riofita 2018).

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan barang publik seperti bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Melalui kebijakan yang diimplementasikan oleh BUMN seperti Pertamina, pemerintah tidak hanya berupaya memastikan BBM bersubsidi tersedia secara merata, tetapi juga mendistribusikannya secara tepat sasaran dengan efisiensi anggaran. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah penerapan aplikasi MyPertamina sebagai media digital dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam penyediaan barang publik. Ini merupakan niat pelanggan untuk menggunakan MyPertamina tidak dapat dilepaskan dari efektivitas kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada alokasi anggaran, tetapi juga pada peningkatan kapasitas institusional dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penyediaan barang publik dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam penyediaan barang publik dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam penyediaan barang publik, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia. Studi literatur dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep, teori, dan temuan empiris yang sudah ada secara mendalam. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, OECD, dan Asian Development Bank. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menyoroti pola-pola yang muncul dari hasil kajian literatur, serta mengelompokkan isu-isu kunci yang berkaitan dengan penyediaan barang publik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Di tengah tantangan globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perkembangan teknologi dan komunikasi digital membuka peluang bagi sektor ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya untuk generasi milenial Muslim. di industri kreatif menghadapi tantangan unik dibandingkan dengan sektor lainnya. Tenaga kerja dalam industri ini sering terdiri dari individu yang memiliki bakat dan kemampuan khusus sehingga memerlukan pendekatan manajerial yang berbeda (Hendra Riofita 2024).

Salah satu studi penting yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah penelitian oleh Dahrul Syah dan Suryadarma yang menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) untuk mengevaluasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pengeluaran publik. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas institusional di tingkat daerah sangat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran publik, terutama untuk penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan (Suryadarma 2016). Studi ini memperkuat asumsi bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam menyediakan barang publik sangat tergantung pada kualitas tata kelola di tingkat lokal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang besar tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, terutama jika disertai dengan kelemahan

dalam akuntabilitas.

Selain itu, model ekonometrik Vector Autoregression (VAR) juga dikaji melalui studi Azwar (2016) yang mengevaluasi pengaruh pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa shock pada sektor pengadaan pemerintah memberikan kontribusi sebesar 91,12% terhadap variasi pertumbuhan ekonomi nasional. Penggunaan model VAR memungkinkan analisis hubungan dinamis antara kebijakan belanja pemerintah dan variabel makroekonomi lainnya secara simultan. Temuan ini menguatkan argumen bahwa kebijakan alokasi pemerintah melalui pengadaan barang publik berperan sebagai stimulus ekonomi yang signifikan, terutama pada saat terjadi perlambatan pertumbuhan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga merujuk pada studi oleh (Martinez-Vazquez, Arze del Granado, dan Boex 2017) yang menggunakan data tingkat provinsi di Indonesia antara tahun 2003–2018 untuk mengevaluasi hubungan antara desentralisasi fiskal dan tingkat korupsi. Penelitian mereka menunjukkan adanya korelasi positif antara peningkatan otonomi fiskal dengan peluang terjadinya korupsi di tingkat daerah, terutama pada daerah dengan kapasitas kelembagaan yang lemah. Temuan ini penting dalam memahami bahwa walaupun desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, namun juga membawa risiko tata kelola yang lebih kompleks dan kurang transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis literatur dan data sekunder menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penyediaan barang publik memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas serta kualitas layanan di berbagai sektor, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini beragam antarwilayah, dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta integritas birokrasi lokal.

1. Dampak Intervensi Pemerintah terhadap Akses dan Kualitas Barang Publik

Intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, seperti pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, terbukti berhasil memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat miskin dan kelompok marjinal. Contohnya, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah meningkatkan partisipasi sekolah dan akses kepada layanan kesehatan dasar secara nasional. Penelitian Suryadarma (2016) menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas institusi lokal yang baik cenderung lebih efektif dalam memanfaatkan dana publik untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, studi oleh Pramusinto & Widianingsih (2020) menegaskan bahwa intervensi pemerintah yang disertai dengan transparansi anggaran dan partisipasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas dalam penyediaan barang publik. Dalam konteks program BOS, pelibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana sekolah terbukti mampu meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

2. Ketimpangan Regional dalam Penyediaan Barang Publik

Desentralisasi fiskal memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam merancang

dan melaksanakan kebijakan layanan publik, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam hal kualitas dan efisiensi antarwilayah. Daerah dengan sumber daya fiskal yang besar dan tata kelola yang baik mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang rendah. Pal dan Wahhaj (2012) menunjukkan bahwa perbedaan sistem sosial dan politik lokal memengaruhi preferensi pengeluaran daerah. Komunitas yang dipengaruhi oleh hukum adat cenderung lebih memprioritaskan pengeluaran untuk layanan dasar, sedangkan komunitas berbasis elektoral lebih fokus pada pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan.

3. Risiko Tata Kelola dan Korupsi dalam Desentralisasi

Desentralisasi fiskal juga memperbesar risiko korupsi, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Studi oleh Martinez-Vazquez dkk. (2017) mengungkapkan bahwa peningkatan kewenangan fiskal tanpa penguatan institusi pengawasan memudahkan praktik korupsi terjadi di tingkat lokal. Hal ini berdampak negatif terhadap efisiensi belanja publik dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara rutin menemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana publik di berbagai daerah. Selain itu, penelitian oleh Ghozali dan Suprayitno (2020) menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang berorientasi pada pengadaan barang dan jasa dapat mempercepat pemulihan ekonomi di sektor-sektor yang terdampak krisis ekonomi global, seperti sektor industri manufaktur dan perdagangan.

4. Peran Strategis Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Stimulus Ekonomi

Analisis oleh Azwar (2016) dengan menggunakan model VAR menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan belanja publik dapat berfungsi sebagai stimulus. Sektor konstruksi dan jasa mengalami peningkatan aktivitas sebagai respons terhadap belanja modal pemerintah, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan mendorong konsumsi domestik. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Nugroho (2019) yang menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan PDB melalui peningkatan permintaan agregat.

5. Kebutuhan Reformasi Kebijakan Berbasis Data dan Partisipasi

Secara umum, temuan menunjukkan bahwa keberhasilan penyediaan barang publik tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, reformasi kebijakan berbasis data (evidence-based policy) sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan dapat memperkuat legitimasi serta efisiensi implementasi program public. Sekalipun motivasi finansial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, pimpinan yang mengabaikan motivasi finansial bukanlah tindakan yang arif, karena bukti empiris menunjukkan bahwa konstata motivasi finansial dan motivasi nonfinansial tetap memiliki dampak signifikan (Hendra Riofita 2023).

SIMPULAN

Penyediaan barang publik merupakan fungsi esensial pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kegagalan pasar. Berdasarkan analisis literatur dan data sekunder, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan program-program strategis seperti BOS dan JKN terbukti mampu meningkatkan akses dan kualitas barang publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi kepada daerah juga memunculkan disparitas dalam pelayanan publik, tergantung pada kapasitas fiskal, tata kelola, serta institusi lokal yang ada.

Selain itu, tantangan serius muncul dalam bentuk tata kelola yang lemah dan meningkatnya risiko korupsi, terutama pada pengadaan barang dan jasa publik. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan penyediaan barang publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas institusi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang berbasis data (evidence-based), melibatkan masyarakat secara aktif, serta memperkuat kapasitas institusional dan mekanisme pengawasan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwan. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 149-167.
- Azwar. (2020). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Perdagangan Barang / Jasa dan Pengaruh terhadap Indonesia . *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20.
- Ghozali, I., & Suprayitno, E. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Sektor Manufaktur dan Perdagangan: Perspektif Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(4), 250-263.
- Martinez-Vazquez, J. A. (2017). Corruption, Fiscal Decentralization, and Governance Quality in Indonesia. *Journal of Development Studies*, 389-404.
- Nugroho, R. (2019). Analisis Dampak Pengeluaran Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 145-158.
- Pramusinto, A., & Widianingsih, I. (2020). Partisipasi Publik dan Transparansi Anggaran dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 23–35.
- Riofita, H. (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan . *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 30-31.
- Riofita, H. (2018). Pengaruh Motivasi Finansial dan Nonfinansial terhadap indonesia. *provided by FKIP UNS Journal Systems*, 7.
- Suryadarma. (2016). Does Decentralization Improve Service Delivery? Evidence from Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 142–155.
- Wahhaj, P. &. (2012). Desentralisasi Fiskal, Lembaga Lokal dan Persediaan

Barang Publik . *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 70-76
Riofita, H. (2023). Augmenting Customer Intention to Use Mypertamina . *Jurnal Manajemen Teknologi*, 149-167.